



# Dana Desa Tahap II

## Terganjil

### Mepet, Waktu Realisasi Hanya Dua Bulan

DENPASAR - Munculnya dana desa yang begitu besar pada APBD Perubahan Kota Denpasar beberapa waktu lalu, masih menyusahkan pihak desa sebagai penyelenggara. Apalagi, dana desa tersebut, yang seharusnya tahap pertama sudah diberikan Pemerintah Kota Denpasar pada bulan Juni lalu kepada masing-masing desa, justru baru terealisasi Agustus ini.

Hal ini tentu akan membuat desa kebingungan merealisasikan dana yang cukup besar tersebut dalam waktu singkat. Belum lagi desa harus membuat laporan realisasi tahap pertama sebagai syarat wajib desa mendapatkan dana tahap kedua yang akan diberikan Pemerintah Kota Denpasar sekitar bulan September ini atau Oktober mendatang.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kota Denpasar I Made Mertajaya mengungkapkan, pihaknya sudah merealisasikan dana desa tersebut secara bertahap se-

suai dengan amanat Undang-Undang Desa. Pada tahap pertama pihaknya akan merealisasikan dana desa sebesar 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen.

"Desa pada tahap pertama mengajukan sesuai dengan revisi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Red), dan besar dana yang diberikan 40 persen, atau sekitar Rp 300 juta lebih per desa," terangnya, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu kemarin (30/8).

Dalam hal pengawasan, Mertajaya memastikan bahwa timnya akan terus melakukan upaya pengawasan sebagai langkah mengantisipasi persoalan realisasi dana desa di masing-masing desa. "Yang jelas, kami akan awasi sekaligus akan melakukan pembinaan terhadap desa yang ada di Kota Denpasar," singkatnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan Kota Denpasar I Made Widra mengakui, jika pemberian dana desa tersebut tidak bisa terealisasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan pemerintah. "Jadwalnya sebenarnya pada bulan Juni atau Juli kemarin untuk tahap pertama. Tetapi karena

ada peningkatan dana desa pada APBD Perubahan, jadi kami tidak bisa merealisasikan tepat waktu," terangnya.

Widra pun mengatakan sangat yakin jika desa di Kota Denpasar dapat merealisasikan dana desa tahap pertama yang jumlahnya mencapai Rp 300 juta per desa tersebut dengan baik sesuai dengan APBDes masing-masing desa yang sudah direvisi.

"Kami yakin desa mampu membuat laporan realisasi tahap pertama walaupun singkat. Kan sudah sesuai dengan APBDes, desa tinggal melaksanakan saja," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Kepala Desa dan Lurah se-Kota Denpasar Ida Bagus Bima Putra juga mengakui, pada saat pertama direalisasikan dana desa tahap pertama tersebut memang banyak terdapat kekeliruan. "Yang namanya barang baru, ya pasti ada kekeliruan," terangnya.

Dengan sangat yakin pihaknya pun mampu menyusun laporan tahap pertama untuk merealisasikan dana desa tahap kedua, meski waktunya tergolong sangat singkat. "Semua teman-teman di kepala desa sudah mulai merancang laporan re-

alisasi dana desa tahap pertama. Semoga saja tidak ada persoalan lagi," imbuh Bima Putra, yang juga Kepala Desa Kesiman Kertalangu ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Wayan Mariana Wandhira yang juga dihubungi menilai, pemberian dana desa tahap pertama tersebut tergolong sangatlah singkat, apalagi jumlah dana yang diberikan cukup besar.

"Menjadi kekhawatiran kami ketika pemberian dana desa tahap pertama tersebut asal lewat saja. Tidak ada pembangunan substansial di desa, yang justru akan sia-sia jika tidak memberikan manfaat besar kepada masyarakat," ujarnya.

Ia meminta kepada pihak Pemerintah Kota Denpasar juga meski bertindak serius dalam hal pengawasan, agar pelaksanaan dana desa tersebut tepat sasaran sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang dan aturan tentang dana desa tersebut.

"Paling tidak ada nilai positif dari dana desa tersebut yang langsung menyentuh masyarakat," pinta pejabat asal Sanur ini. (hen/han)

Edisi : Senin, 31 Agustus 2015

Hal : 24



## Radar Bali

# LED TV Simpang Enam Kebal Sanksi



HENDRI HARLIWAN/RADAR BALI

**BANDEL** : LED TV di simpang enam Jalan Teuku Umar yang masih dibiarkan, meski menyalahi aturan zonasi saat difoto kemarin.

**DENPASAR** - LED TV atau reklame gambar bergerak yang terpasang di atas pos Polisi simpang enam Jalan Teuku Umar Denpasar lagi-lagi gagal kena sanksi. Walaupun hal tersebut jelas-jelas menyalahi aturan zonasi reklame, namun hingga kini keberadaan LED TV tersebut tidak ada penindakan penertiban.

Pantauan di lapangan, meski LED TV tersebut katanya sudah diperingati, tetapi masih saja menayangkan beberapa iklan. Bahkan LED TV tersebut masih beroperasi hingga sekarang.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Minggu kemarin (30/8), Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP) Kota Denpasar Made Kusuma Diputra men-

gaku bahwa LED TV di Jalan Teuku Umar tersebut memang telah menyalahi aturan zonasi. Namun ia berdalih bahwa LED TV tersebut sudah terpasang sebelum adanya aturan zonasi yang ditetapkan Pemerintah Kota Denpasar.

"Memang secara aturan di persimpangan hanya ada dua LED saja yang boleh terpasang. Tetapi yang di simpang enam

Teuku Umar ada sebelum ada aturan zonasi," kilahnya.

Meski pihaknya mengaku sudah melakukan teguran kepada pemilik LED TV untuk menurunkan sendiri dan sudah berkoordinasi dengan Sat Pol PP, namun hingga kemarin belum juga diturunkan.

"Kami akan tata secara bertahap. Kami akui jika tenaga dan peralatan yang kami miliki untuk menertibkan beberapa pelanggaran sangat terbatas," katanya singkat.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Denpasar AA Susrutha Ngurah Putra, kembali angkat bicara. Peralnya, beberapa kali dia meminta LED TV tersebut diturunkan, tetapi hingga kemarin tidak ada tindakan tegas dari pihak yang berwenang. "Kami menginginkan agar jangan tebang pilih soal penindakan. Kalau memang jelas melanggar harus ditindak tegas," ucapnya.

Susruta pun mempertanyakan masalah penayangan iklan pada LED TV tersebut yang secara terus menerus walaupun melanggar. (hen/han)

Edisi : Senin, 31 Agustus 2015

Hal : 24



## Pemerintah Janji Fasilitasi Modal LPD

**SINGARAJA** - Pemerintah Kabupaten Buleleng berjanji akan memfasilitasi modal bagi lembaga perkreditan desa (LPD) yang kini mulai bangkit dan berkembang lagi. Terutama setelah mereka ambruk lantaran dananya dibawa kabur pengurusnya dan kini telah mendapat sanksi hukum.

Saat ini setidaknya ada 37 LPD di Kabupaten Buleleng - dari total 169 LPD - dalam kondisi mati suri. Puluhan LPD itu tak lagi beroperasi setelah kehabisan modal dan terjebak dalam kredit macet yang terlampau besar.

Kabag Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Buleleng,

Ketut Suparto mengatakan, saat ini jumlah LPD yang tak aktif memang cukup besar. Namun kini LPD-LPD yang tak aktif itu didorong kembali beraktifitas, sehingga bisa membangkitkan roda perekonomian di desa pakraman.

"Permasalahan ekonomi desa pakraman ini kedepannya akan semakin kompleks, apalagi ada persaingan antar lembaga keuangan yang semakin ketat. Masalah permodalan dan manajemen akan menjadi masalah utama," ungkap Suparto.

Suparto mengatakan pihaknya kini terus menjalin komunikasi dengan Badan Kerjasama (BKS)

LPD Kabupaten Buleleng. Harapannya BKS LPD Buleleng dapat memberikan suntikan modal kepada LPD-LPD yang baru bangkit, dan sudah dalam kondisi siap berkembang lagi.

"Kami siap membantu dan mengkoordinasikan. Asalkan mereka bisa kerja sesuai regulasi yang ada. Kami siap komunikasi dengan BKS LPD supaya dapat suntikan modal," imbuhnya. Untuk diketahui, saat ini aset LPD di Kabupaten Buleleng terbilang besar. Pada semester pertama tahun 2015, aset LPD di Kabupaten Buleleng mencapai Rp 1,35 triliun. (eps/gup)

Edisi : Senin, 31 Agustus 2015  
Hal : 29



## Radar Bali

### Validasi Data, Tunggu Uji Kelayakan

SINGARAJA - Dinas Sosial Buleleng masih menunggu uji kelayakan warga miskin, sebelum menerbitkan data resmi warga miskin terbaru. Data warga miskin itu akan dijadikan acuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan, baik itu dari program pemerintah maupun bantuan dari pihak korporasi.

Berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, jumlah warga miskin di Buleleng mencapai 41.992 kepala keluarga. Sementara pada tahun 2014 lalu, sesuai dengan data penerima program simpanan keluarga sejahtera dari Tim Nasional Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (TNP2K), jumlah warga miskin di Buleleng menjadi 41.929 kepala keluarga. Artinya dalam tiga tahun, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng berkurang 63 kepala keluarga.

Kepala Dinas Sosial Buleleng, Gede Komang mengatakan, saat ini sebenarnya tim di Dinsos Buleleng sudah menyelesaikan verifikasi data warga miskin, berdasarkan data yang diberikan TNP2K. Tim melakukan verifikasi ulang berdasarkan nama dan alamat alias *by name by address*. "Verifikasinya sudah selesai. Sekarang kan tinggal uji kelayakan di masing-masing desa. Nanti kami umumkan, kalau memang ada sanggahan, ada yang belum masuk atau ada yang belum layak, kami verifikasi lagi," ujar Gede Komang, Minggu (30/8). (eps/gup)

Edisi : Senin, 31 Agustus 2015  
Hal : 29